



**TAHUN
2022**

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi NTB	25
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	62
3.3. Program dan Kegiatan.....	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	83
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	26
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	41
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	60
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional	61
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat	66
Tabel.4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja adalah bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali penyusunan kebijakan, penyusunan rencana, penyusunan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan penyempurnaan program pembangunan. Sedangkan penyusunan program adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, sebagai dokumen tahunan, maka keberadaan Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis bagi perangkat daerah itu sendiri karena didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi, program, kegiatan dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Mengingat Pentingnya dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk optimalisasi pencapaian maka Rencana Kerja yang disusun bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian yang didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi bahan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dan sebagai bahan Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja tahun berikutnya. Di samping penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang merupakan proses perencanaan dan penganggaran berikutnya juga harus mengacu kepada RKPD Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Satpol PP Prov. NTB, dengan maksud agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menguraikan gambaran umum pencapaian pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian Tahun yang sedang berjalan.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Perda serta perlindungan masyarakat.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana kerja dan rencana pendanaan indikatif tahun rencana 2022.

- **BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (*ex ante*), pada saat berlangsung (*on going*), atau sesudah selesai (*ex post*). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembandingan dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP Provinsi NTB ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Satpol PP Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu pada periode Renstra Tahun 2019-2023 dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan (tahun 2021).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB s/d tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2021
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.05.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD		BB					BB	BB	100
X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	11					11	11	100
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4					1	1	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah									
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3					1	1	100
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3					1	1	100
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	3					1	1	100
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3					1	1	100
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5					2	2	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18					6	6	100
X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	45					15	15	100
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	200					150	150	100
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1					1	1	100
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8					8	8	100
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	3					1	1	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	26					18	18	100
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	36					12	12	100
X.XX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	6					2	2	100
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3					1	1	100
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD	Laporan	18					6	6	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		SKPD yang Tersusun									
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	5					2	2	100
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan								
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2					2	2	100
X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200					200	200	100
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	1800					600	600	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kelengkapannya									
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	140					30	30	100
X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8					8	8	100
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5					5	5	100
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	71					34	34	100
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	21					11	11	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30					30	30	100
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9					9	9	100
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	16675					5475	5475	100
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	3510					1110	1110	100
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5					5	5	100
X.XX.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	190					92	92	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	3					1	1	100
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	18					2	2	100
X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	10					-	-	100
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit	101					54	54	100
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	5					2	2	100
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	63					33	33	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	9					9	9	100
X.XX.01.1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	1500					600	600	100
X.XX.01.1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6					6	6	100
X.XX.01.1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	9					5	5	100
X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	482					103	103	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6					20	20	100
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	50					16	16	100
X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	30					17	17	100
X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	110					50	50	100
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	234					66	66	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	1					1	1	100
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	7					-	-	-
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	5					-	-	-
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100		100			100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100		100			100	100	100
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	%	33.33		0			100	100	100
		Persentase Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	%	7.04		0			4.40	4.40	100
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15		18			17	17	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali	36					12	12	100
		Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	10					10	10	100
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	30		8			10	10	100
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah	Kegiatan	30					10	10	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dini/Konflik di Masyarakat									
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15		18			17	17	100
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6					2	2	100
		Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali	5					1	1	100
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	200					100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	2100		0			400	400	100
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	725					675	675	100
		Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	170		0			50	50	100
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	3					1	1	100
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	6					5	5	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	2					1	1	100
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36					12	12	100
1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	14		17			16	16	100
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten/ Kota	10					10	10	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	30		0			10	10	100
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36					12	12	100
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36					12	12	100
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	14					16	16	100
1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131					43	43	100
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120					40	40	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2021	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11					3	3	100
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5					1	1	100
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5					1	1	100
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12					4	4	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi NTB

Berdasarkan Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 yang telah ditetapkan yakni *"Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang"*, selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.

Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan sosialisasi, pengawasan, pengawalan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Pergub Provinsi NTB.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka tercantum dalam Perubahan Renstra periode Tahun 2019-2023 dan mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2019-2023.

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB ditampilkan sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Nilai SAKIP PD					BB	BB	BB			BB	BB	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen				11	10	11			10	11	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				1	1	2		1	1	2	
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokumen				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen				2	1	2		2	1	1	
	Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen					1			0	1	1	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				6	6	6		3	6	6	
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen				15	15	15			15	15	
	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang				150	180	200		150	180	200	
	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang				1	1	1		1	1	1	
	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang				8	8	8		0	8	8	
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan				18	4	4		4	4	4	
	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan				12	12	12		3	12	12	
	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen				2	2	2			2	2	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan				1	1	1			1	1	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan				6	6	6			6	6	
	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen				2	1	2		0	1	2	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1			0	1		
	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang				2	2	2			2	2	
	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang				200	200	200			200	200	
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel				600	600	600		0	600	600	
	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang				30	50	60		0	50	60	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis				8	8	8			8	8	
	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis				5	5	5		0	5	5	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah				34	20	17		0	20	17	
	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis				11	5	5		0	5	5	
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis				30	30	30		0	30	30	
	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis				9	9	9		0	9	9	
	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar				5475	5600	5600		0	5600	5600	
	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak				1110	1200	1200		0	1200	1200	
	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis				5	5	5		0	5	5	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/ Unit				92	54	44			54	44	
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit				1	1	1			1	1	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit				2	9	7			9	7	
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit				-	5	5			5	5	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/ Unit				54	22	25			22	25	
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah				2	2	1			2	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit				33	20	10			20	10	
	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa				9	9	9			9	9	
	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat				600	1000	1500		0	1000	1500	
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening				6	6	6		0	6	6	
	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang				5	9	9		0	9	9	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit				103	171	208			171	208	
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit				20	6	6		0	6	6	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit				16	40	50		0	40	50	
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit				17	22	27			22	27	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit				50	30	30			30	30	
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit				66	73	95		0	73	95	
	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit				-	3	4			3	4	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit				-	2	3			2	3	
	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%			100	100	100	100			100	100	
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%			100	100	100	100			100	100	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	%			0	100	20.00	33.33			20.00	33.33	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Persentase Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	%			0	4.40	6.16	7.04			6.16	7.04	
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus			18	17	16	15		2	16	15	
	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali				12	12	12		2	12	12	
	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota				10	10	10		2	10	10	
	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah			8	10	10	10		3	10	10	
	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan				10	10	10		4	10	10	
	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus			18	17	16	15		2	16	15	
	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali				2	2	2		0	2	2	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali				1	1	2		1	1	2	
	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang				100	100	100		0	100	100	
	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang			0	400	600	700		80	600	700	
	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang				675	725	725		0	725	725	
	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang			0	50	60	80		0	60	80	
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama				1	1	1		0	1	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis				5	6	6			6	6	
	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP				1	1	-			1	-	
	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali				12	12	12		0	12	12	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus			17	16	15	14		3	15	14	
	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupate n/ Kota				10	10	10		0	10	10	
	Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali			0	10	10	10		3	10	10	
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali				12	12	12		3	12	12	
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali				12	12	12		3	12	12	
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus				16	15	14		3	15	14	
	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang				43	43	45			43	45	
	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang				40	40	40		0	40	40	
	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang				3	3	5		0	3	5	
	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas				1	2	2		0	2	2	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1) TW 1	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali				1	2	2		0	2	2	
	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis				4	4	4		0	4	4	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Provinsi NTB

2.3.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah :

1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Masih tingginya pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM.
5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat masih rendah.
6. Tingkat kriminalitas masih tinggi.
7. Masih maraknya penyakit masyarakat.
8. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.
9. Penegakan Perda dan Pergub belum optimal terutama yang berorientasi penerimaan asli daerah (PAD).

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis

1. Untuk Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang

Hasil telaahan kebutuhan personil Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang penetapan jumlah personil Satpol PP, bahwa Satpol PP Provinsi NTB memiliki skor sebesar 819 skor atau seharusnya Jumlah ideal anggota Satpol PP Provinsi NTB berkisar antara 301 s/d 400 orang. Kondisi kekurangan personil seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Satpol PP, sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai minimal sebanyak 301 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Pergub sejalan dengan perkembangan pembangunan.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatur, personil masih harus ditingkatkan/ belum memadai

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Nusa Tenggara Barat. Kondisi relatif masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi

Nusa Tenggara tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.

3. Masih terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Pergub. Proses pelaksanaan tugas harus selalu mengacu pada pedoman prosedur tetap (protap), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibum di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum berupa:

Konflik/perkelahian masal antar desa, antar lingkungan, antar kelompok, perkelahian masal, demonstrasi, anarkis masal dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.

4. Masih terjadi pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM

Perlindungan hak sipil dan masyarakat masih merupakan opini publik dalam hal mencari hak dan keadilan baik dalam kehidupan menyangkut sosial, ekonomi, demokratisasi dan hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia merupakan upaya semua pihak baik aparatur maupun masyarakat dengan memperhatikan aspek keaneka ragaman, nilai sosial, nilai budaya khususnya agama, adat istiadat, lokal kultur dan aspek lainnya yang dijunjung tinggi. Nilai kesamaan dan kesetaraan dalam masyarakat menginginkan terwujudnya perlindungan yang sama di muka hukum serta dapat mengembangkan dinamika kehidupan masyarakat secara demokratis tegaknya hukum dan menghormati HAM. Perlindungan hak-hak sipil dalam Hukum dan HAM sebagai warga Negara setiap individu mempunyai hak yang sama mendapatkan perlindungan Hukum tanpa kecuali serta mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut serta berhak mendapat rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan berdemokrasi.

5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat perlu ditingkatkan

Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud plurarisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

6. Tingkat kriminalitas masih terjadi

Nusa Tenggara Barat tergolong rawan terhadap kriminalitas terutama kejahatan konvensional ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti mengambil hak milik orang lain secara illegal, pencurian, perampasan dan lain-lain. Hal ini terjadi karena pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan hukum masih lemah, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

7. Masih maraknya penyakit masyarakat

Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat kehidupan global yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak merata mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, sehingga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga perilaku dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat perlu ditingkatkan antara lain melalui operasi non yustisi dalam rangka pencegahan peredaran minuman keras, praktik prostitusi dan premanisme.

8. Konflik-konflik horizontal masih terjadi

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi oleh aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan secara kondusif.

9. Penegakan Perda dan Pergub masih belum optimal

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satpol PP bertugas untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang didalam Pasal 255 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Sub Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum kewenangan pemerintah provinsi adalah :
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
 - b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur.
 - c. Pembinaan PPNS Provinsi.
2. Sub Urusan Bencana kewenangan pemerintah provinsi adalah penanggulangan bencana provinsi terkait sub urusan bencana peran Satpol PP adalah mendukung penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh badan/instansi yang berwenang dengan melakukan pembinaan dan memperkuat fungsi linmas di kab/kota.
3. Sub Urusan Kebakaran kewenangan pemerintah provinsi adalah pemetaan rawan kebakaran.

Tabel. 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP PD		BB	18,060,738,462	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP PD		BB	18,060,738,462	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	308,985,909	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	308,985,909	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	37,126,658	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	37,126,658	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	27,054,113	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	27,054,113	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	27,054,113	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	27,054,113	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1	28,014,191	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1	28,014,191	
			Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	180,413,622	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	180,413,622	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	15,806,354,717	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	15,806,354,717	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi NTB	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	180	15,665,045,408	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi NTB	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	180	15,665,045,408	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	11,044,870	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	11,044,870	
		Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8			Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	25,178,740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	25,178,740	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	4	105,085,698	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	4	105,085,698	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi NTB	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi NTB	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	14,141,917	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	14,141,917	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan	6	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan	6	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	1	14,141,917	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	1	14,141,917	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200	180,574,568	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200	180,574,568	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi NTB	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	600	145,166,418	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi NTB	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	600	145,166,418	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi NTB	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	50	35,408,150	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi NTB	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	50	35,408,150	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	757,603,917	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	757,603,917	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	26,851,647	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	26,851,647	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	20	141,751,677	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	20	141,751,677	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi NTB	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	5	39,479,737	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi NTB	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	5	39,479,737	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi NTB	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30	33,744,469	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi NTB	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30	33,744,469	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi NTB	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9	25,256,881	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi NTB	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9	25,256,881	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi NTB	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	5600	19,733,396	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi NTB	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	5600	19,733,396	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi NTB	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	1200	33,432,478	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi NTB	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	1200	33,432,478	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5	437,353,632	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5	437,353,632	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	54	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	54	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	1	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	1	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	9	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	9	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	5	-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	5	-	
	Pengadaan Mebel	Provinsi NTB	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit	22	-	Pengadaan Mebel	Provinsi NTB	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit	22	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	2	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	2	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	20	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	20	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	9	364,127,922	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	9	364,127,922	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi NTB	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	1000	5,294,312	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi NTB	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	1000	5,294,312	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi NTB	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6	28,830,351	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi NTB	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6	28,830,351	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	9	330,003,259	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	9	330,003,259	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	171	628,949,512	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	171	628,949,512	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	196,330,961	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	196,330,961	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	40	318,230,166	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	40	318,230,166	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	22	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	22	-	
	Pemeliharaan Mebel	Provinsi NTB	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	30	-	Pemeliharaan Mebel	Provinsi NTB	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	30	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	73	63,573,724	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	73	63,573,724	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provin si NTB	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	1	50,814,661	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provins i NTB	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	1	50,814,661	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provin si NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	-	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provins i NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	-	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provin si NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	-	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provins i NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	3,932,903,666	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	3,932,903,666	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100				Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	%	20				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	%	20		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	%	6.16				Persentase Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	%	6.16		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	16	1,996,501,222	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	16	1,996,501,222	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	12	825,136,385	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	12	825,136,385	
		Provinsi NTB	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	10			Provinsi NTB	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	10		
		Provinsi NTB	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	10			Provinsi NTB	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	10		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Provin si NTB	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiata n	10			Provins i NTB	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiata n	10		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabup aten Lombo k Barat, Kota Matar am	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	16	346,441,700	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabup aten Lombo k Barat, Kota Matara m	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	16	346,441,700	
	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provin si NTB	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	2	98,747,968	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provins i NTB	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	2	98,747,968	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali	1				Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali	1		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provin si NTB	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	100	232,993,509	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provins i NTB	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	100	232,993,509	
		Provin si NTB	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	600			Provins i NTB	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	600		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Provin si NTB	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	725	353,214,546	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Provins i NTB	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	725	353,214,546	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Provin si NTB	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	60			Provins i NTB	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	60		
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provin si NTB	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanji an Kerjasa ma	1	68,556,597	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provins i NTB	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanji an Kerjasa ma	1	68,556,597	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provin si NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	6	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provins i NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	6	-	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provin si NTB	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	1	-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provins i NTB	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	1	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Provin si NTB	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	12	71,410,518	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Provins i NTB	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	12	71,410,518	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	15	1,710,210,892	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	15	1,710,210,892	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provin si NTB	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupa ten/ Kota	10	480,873,163	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provins i NTB	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupa ten/ Kota	10	480,873,163	
		Provin si NTB	Jumlah sosialisasi perda/pegub kepada masyarakat	Kali	10			Provins i NTB	Jumlah sosialisasi perda/pegub kepada masyarakat	Kali	10		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provin si NTB	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	12	954,711,073	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provins i NTB	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	12	954,711,073	
		Provin si NTB	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	12			Provins i NTB	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	12		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provin si NTB	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	15	274,626,656	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provins i NTB	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	15	274,626,656	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	43	226,191,552	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	43	226,191,552	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provin si NTB	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	40	157,535,129	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provins i NTB	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	40	157,535,129	
		Provin si Luar NTB	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	3			Provins i Luar NTB	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	3		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	2	68,656,424	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	2	68,656,424	
		Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	2			Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	2		
		Provinsi NTB	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	4			Provinsi NTB	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	4		

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP PROVINSI NTB

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1

Identifikasi dan Konsistensi Kebijakan

➤ Prioritas RPJMN	:	Misi RPJMN Tahun 2020-2024: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
➤ Arah kebijakan dan RKP 2022 (Prioritas Nasional Tahun 2022)	:	<i>Perioritas Nasional 7:</i> <i>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</i> Dengan strategi: a. Konsolidasi demokrasi b. Optimalisasi kebijakan luar negeri c. Penegakan hukum nasional d. Reformasi birokrasi dan tata Kelola e. Menjaga stabilitas keamanan nasional
➤ Prioritas RPJMD	:	Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023: Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan
➤ Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022	:	1. Pemulihan social ekonomi masyarakat pasca pandemic Covid-19 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap 3. Menjaga stabilitas makro 4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi
➤ Tema pembangunan Daerah NTB Tahun 2022	:	“Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”
➤ Program Prioritas Tahun 2022	:	Prioritas Daerah 10, Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
➤ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	:	Tujuan : Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman

		Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah
--	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Provinsi NTB

3.2.1. Tujuan

Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

3.2.2. Sasaran

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Sasaran tersebut didukung oleh beberapa Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan untuk Tahun 2022 antara lain :

a. Meningkatkan Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD
3. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Tersusunnya DPA-SKPD
5. Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD
6. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2. Tersedianya Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

d. Tersedianya Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi

1. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Tersedianya Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat

e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
4. Tersedianya Bahan Logistik Kantor
5. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
6. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Tersedianya makanan dan minuman Tamu
8. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Terpeliharanya dan/atau Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Terlaksananya kegiatan operasi pencegahan pelanggaran trantibum dan turjawali
2. Terlaksananya pengawalan dan pengamanan Pejabat dan Tamu Daerah
3. Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada
4. Tersedianya masyarakat yang mampu mendeteksi dini dan mencegah konflik

5. Terlaksananya Operasi Pekat
6. Terlaksananya Rakor Tibum
7. Terlaksananya Rakor Linmas
8. Terlatihnya Personil Satpol PP dan Satlinmas
9. Terlaksananya Gelar Pasukan Linmas
10. Terlatihnya Personil Satpol PP dalam peningkatan kapasitas SDM
11. Terlaksananya kerjasama antar lmbaga dalam pencegahan tindak kejahatan
12. Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

i. Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah

1. Terbinanya anggota masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat pada nilai nilai luhur budaya bangsa
2. Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada
3. Terlaksananya Pengawasan Perda/Pergub
4. Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada

j. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM PPNS

1. Tersedianya Tenaga PPNS yang terlatih
2. Tersedianya Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
3. Terlaksananya Sidang di Tempat
4. Tersedianya Layanan Penguatan Sekber PPNS

3.2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
-------------------	-------------------	--

Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat • Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sama dengan Jumlah Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun N dibagi Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun N dikali 100% ➤ Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah sama dengan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Tahun N dibagi Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Tahun N dikali 100% • Tipe Perhitungan: Absolut • Sumber Data : Satpol PP Prov. NTB
---	--	---

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah lainnya, serta perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD			BB	18,060,738,462			BB	21,345,458,356
X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Dokumen		10	308,985,909			11	365,181,406

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan Evaluasi Kinerja								
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi NTB	1	37,126,658			2	43,878,911
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	27,054,113			1	31,974,464
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	27,054,113			1	31,974,464
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	4,661,607			1	5,509,416
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	4,661,607			1	5,509,416
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen	Dokumen	Provinsi NTB	1	28,014,191			2	33,109,153

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja SKPD								
		Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		1					
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi NTB	6	180,413,622			6	213,225,581
X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		15	15,806,354,717			15	18,681,068,168
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	Provinsi NTB	180	15,665,045,408			200	18,514,058,831
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	Provinsi NTB	1	11,044,870			1	13,053,609
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	Provinsi NTB	8				8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	25,178,740			1	29,758,016
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	Provinsi NTB	4	105,085,698			4	124,197,712
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	Provinsi NTB	12	-			12	-
X.XX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		2	14,141,917			2	16,713,918
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Provinsi NTB	1	-			1	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan		6	-			6	-
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	14,141,917			2	16,713,918
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1					
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang		2	-			2	-
X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		200	180,574,568			200	213,415,798
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	Provinsi NTB	600	145,166,418			600	171,567,942

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelengkapannya								
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	Provinsi NTB	35	35,408,150			35	41,847,857
X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		8	757,603,917			8	895,389,903
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	Provinsi NTB	5	26,851,647			5	31,735,176
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	Provinsi NTB	20	141,751,677			17	167,532,160
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	Provinsi NTB	5	39,479,737			5	46,659,947
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	Provinsi NTB	30	33,744,469			30	39,881,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	Provinsi NTB	9	25,256,881			9	29,850,368
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	Provinsi NTB	5600	19,733,396			5600	23,322,323
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	Provinsi NTB	1200	33,432,478			1200	39,512,867
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	Provinsi NTB	5	437,353,632			5	516,895,462
X.XX.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit		54	-			44	-
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	Provinsi NTB	1	-			1	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	Provinsi NTB	9	-			7	-
X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	Provinsi NTB	5	-			5	-
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit	Provinsi NTB	22	-			25	-
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	Provinsi NTB	2	-			1	-
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	Provinsi NTB	20	-			10	-
X.XX.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa		9	364,127,922			9	430,352,137

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	Provinsi NTB	1000	5,294,312			1500	6,257,192
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	Provinsi NTB	6	28,830,351			6	34,073,749
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	Provinsi NTB	9	330,003,259			9	390,021,196
X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit		171	628,949,512			208	743,337,026
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	6	196,330,961			6	232,037,819
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	Provinsi NTB	40	318,230,166			50	376,106,922

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang Terpelihara								
X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	22	-			27	-
X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	30	-			30	-
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	73	63,573,724			95	75,135,924
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	Provinsi NTB	1	50,814,661			1	60,056,361
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	3	-			4	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	Provinsi NTB	2	-			3	-
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%		100	3,932,903,666			100	4,648,183,772
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%		100				100	
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		16	1,996,501,222			15	2,359,606,380

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram	12	825,136,385			12	975,204,551
		Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	Provinsi NTB	10				10	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	Provinsi NTB	10				10	
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara	10				10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram	16	346,441,700			15	409,449,308
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	Provinsi NTB	2	98,747,968			3	116,707,334
		Jumlah Rakor Linmas yang dilaksanakan			1					
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satgas Linmas yang Terlatih	Orang	Provinsi NTB	150	232,993,509			150	275,368,211
		Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	Provinsi NTB	600				700	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	Provinsi NTB	700	353,214,546			700	417,453,937
		Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	Provinsi NTB	60				60	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	Provinsi NTB	1	68,556,597			1	81,025,036
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	Provinsi NTB	6	-			6	-
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	Provinsi NTB	1	-			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	Provinsi NTB	12	71,410,518			12	84,398,002
1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		15	1,710,210,892			14	2,021,248,215
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten/ Kota	Provinsi NTB	10	480,873,163			10	568,329,921
		Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	Provinsi NTB	10				10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	Provinsi NTB	12	954,711,073			12	1,128,345,084
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	Provinsi NTB	12				12	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	Provinsi NTB	15	274,626,656			14	324,573,209
1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		43	226,191,552			45	267,329,178
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	Provinsi NTB	40	157,535,129			40	186,186,159
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	Provinsi Luar NTB	3				5	
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat,	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	Provinsi NTB	2	68,656,424			2	81,143,018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan Sekretariat Bersama PPNS									
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	Provinsi NTB	2				2	
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	Provinsi NTB	4				4	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun rencana program, kegiatan dan su kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Provinsi NTB, sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Dearah
 - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- C. Administrasi Umum
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Miliik Daerah
 - 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 13. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 18. Pengadaan Mebeleur
 - 19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - 20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
22. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
23. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional

- D. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Formal
 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
3. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
4. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
7. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Program dan kegiatan yang merupakan program prioritas sesuai RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 - 2023, meliputi :

I. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2.

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

3. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
4. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
7. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Nilai SAKIP PD		BB	18,060,738,462		
X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	308,985,909		
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	37,126,658	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	27,054,113	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	27,054,113	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,661,607	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1	28,014,191	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
			Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1			
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	180,413,622	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	15,806,354,717		
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	180	15,665,045,408		Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	11,044,870	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
			Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8		Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	25,178,740	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	4	105,085,698	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	-	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	14,141,917		
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan	6	-		
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	1	14,141,917	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2	-		
X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200	180,574,568		
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	600	145,166,418	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	35	35,408,150	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	757,603,917		
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	26,851,647	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	20	141,751,677	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	5	39,479,737	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30	33,744,469	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9	25,256,881	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	5600	19,733,396	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	1200	33,432,478	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5	437,353,632	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	54	-		
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	1	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	9	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	5	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit	22	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	2	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	20	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	9	364,127,922		
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	1000	5,294,312	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6	28,830,351	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	9	330,003,259	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	171	628,949,512		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	196,330,961	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	40	318,230,166	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	22	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	30	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	73	63,573,724	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan/atau Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	1	50,814,661	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan/atau Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan/atau Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	-	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	3,932,903,666		
		Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100			
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	16	1,996,501,222		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan operasi pencegahan pelanggaran trantibum dan turjawali	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	12	825,136,385	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram
		Terlaksananya pengawasan dan pengamanan Pejabat dan Tamu Daerah	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	10		Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi NTB
		Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	10		Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB
		Tersedianya masyarakat yang mampu mendeteksi dini dan mecegah konflik	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan	10		Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Kabupeten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Operasi Pekat	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	16	346,441,700	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rakor Tibum	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	2	98,747,968	Bidang Tibumtranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi NTB
		Terlaksananya Rakor Linmas	Jumlah Rakor Linmas yang dilaksanakan		1		Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Potensi Masyarakat	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlatihnya Personil Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Satgas Linmas yang Terlatih	Orang	150	232,993,509	Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
		Terlaksananya Gelar Pasukan Linmas	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	600		Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlatihnya Personil Satpol PP dalam peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	700	353,214,546	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB
			Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	60		Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya kerjasama antar lmbaga dalam pencegahan tindak kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	1	68,556,597	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	6	-	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersusunnya SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	1	-	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	12	71,410,518	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	15	1,710,210,892		
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terbinanya anggota masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat pada nilai nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten/ Kota	10	480,873,163	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB
		Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada	Jumlah sosialisasi perda/pegub kepada masyarakat	Kali	10		Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pengawasan Perda/Pergub	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	12	954,711,073	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/ Pelaksana	Lokasi
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	12		Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terbinanya masyarakat patuh perda/perkada	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	15	274,626,656	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM PPNS	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	43	226,191,552		
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Tersedianya Tenaga PPNS yang terlatih	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	40	157,535,129	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
			Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	3		Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi Luar NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Tersedianya Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	2	68,656,424	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
		Terlaksananya Sidang di Tempat	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	2		Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
		Tersedianya Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	4		Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2022 tidak hanya ditentukan secara akurat dan realistis. Penyusunan Rencana Kerja didukung oleh tekad dan semangat pengabdian seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam implementasi Rencana Kerja di lapangan, tentu akan selalu muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, semoga dapat menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja/Bidang, dan bermakna bagi pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Mataram, 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19681016 198803 1 003